



► PENATAAN MALIOBORO

PKL Minta Dewan Evaluasi UPT

DANUREJAN—Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Trusmi Malioboro (TM) 2 beraudiensi dengan DPRD Kota Jogja, Selasa (17/9). Dalam pertemuan itu, mereka minta Dewan mengevaluasi kinerja UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan Kota Jogja yang dinilai kerap mengintimidasi dan tidak melibatkan PKL dalam rencana relokasi.

Dalam audiensi, PKL TM2 yang diwakili oleh Paguyuban Tri Dharma menunjukkan bukti video tindak kekerasan oleh petugas Jogoboro dari UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya. Beberapa peristiwa itu terjadi pada Sabtu (13/7) dan Minggu (18/8).

Ketua Koperasi Tri Dharma, Arief Usman, menjelaskan aksi demonstrasi yang digelar PKL TM 2 dilakukan karena tidak ada tindak lanjut yang jelas dari Pemkot Jogja dalam pelibatan para PKL dalam relokasi. "Tidak ada pelibatan Tri Dharma dalam rencana relokasi," katanya.

Sayangnya, dalam merespons aksi tersebut, UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya kerap bertindak represif dan mengintimidasi. PKL juga diintimidasi dengan didatangi rumahnya, meminta agar mereka menandatangani pernyataan persetujuan relokasi. Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyadi, menuturkan bentuk intimidasi lainnya adalah beberapa petugas yang mendatangi lapak pedagang dan mengancam.

Anggota DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro, mengatakan berdasarkan hasil validasi PKL TM 2 oleh Pansus DPRD Kota Jogja, tercatat ada 1.041 PKL. Sebanyak 28 PKL meninggal, 55 PKL memakai surat kuasa karena tidak sesuai dengan nama pemilik dan 108 PKL tidak jelas. Sayangnya, sesuai validasi, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara PKL dengan Pemkot Jogja. "Kesepakatan belum terjadi, harus ada proses kewenangan di Kota Jogja agar segera diselesaikan," kata dia.

Dewan, menurut Susanto, akan mengundang UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan Kota Jogja untuk menjembatani komunikasi dengan para PKL.

Terpisah, Kepala UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya Kota Jogja, Ekwanto, membantah adanya intimidasi kepada PKL. "Kami tidak percaya tuduhan itu, petugas kami tidak ada yang mengintimidasi," katanya.

Ia juga menegaskan petugas yang mendatangi rumah PKL untuk keperluan tanda tangan persetujuan relokasi tidak pernah memaksa. Mereka datang langsung ke rumah PKL agar bisa bertemu langsung dengan pemiliknya, bukan karyawan atau pengontrak. "Tidak ada paksaan sama sekali. Kalau menolak tanda tangan tidak apa apa. Ngarsa Dalem [Gubernur DIY Sri Sultan HB X] *diawahi* ke kami, yang mau mau saja [yang direlokasi]. Yang enggak mau ditinggal saja. Sampai sekarang kami terus menggelar sosialisasi," katanya. (Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005